

ABSTRAK

Octaviani, Richi, 2018. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Khusus Siswa Miskin di SMA Negeri 1 Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun Ajaran 2017/2018*. Skripsi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo. Dosen pembimbing : (I) Dra. Bernadeta Nefo E.W, M.Si (II) Ach. Noor Busthomi, SH, M.Si.

Pendidikan merupakan hal yang amat penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi masyarakat miskin untuk kelangsungan dan tujuan hidup manusia.

Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 pada pasal 46 yang mengatakan bahwa “ Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”., serta pasal 34 ayat 2 yang isinya “Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Hal ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar bagi warga negaranya.

Program BKSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses yang layak, membantu siswa memenuhi kebutuhan kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran,.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) di SMA Negeri 1 Dringu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru (Pengelola BKSM di sekolah), dan siswa penerima BKSM. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Dringu Kabupaten Probolinggo. Metode pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Evaluasi yang dilakukan oleh sekolah menengah atas (SMA) khususnya SMA Negeri 1 Dringu Kabupaten Probolinggo berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun sekali untuk mengetahui perkembangan setiap tahunnya. Evaluasi ini dilakukan agar kedepannya lebih selektif dalam memilih siswa yang benar – benar berhak mendapatkan bantuan tersebut. 2) Hambatan – hambatan dalam pencairan dana BKSM yaitu terlambatnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo untuk mencairkan dana yang seharusnya di awal tahun menjadi di akhir tahun atau di penghujung tahun anggaran. Sebab itulah juga kegiatan operasional siswa seharusnya bisa dilakukan tetapi malah terhambat.

Kata Kunci : Evaluasi Implementasi Kebijakan Sekolah, Bantuan Siswa Khusus Miskin